

Jurnal Pengabdian Kreativitas

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2023, Halaman 22-32

e-ISSN: 2962-5823, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jpk>

DOI: 10.29103/jpek.v1i1.8264

Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Perumusan Kebijakan Publik

Nazaruddin¹, Aiyub², Chalirafi^{3*}, Muryali⁴, Ferizaldi⁵, Defi Irwansyah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah

*Email: chalirafi@unimal.ac.id

ABSTRACT

In the context of evolving village development, the role of the gampong apparatus is crucial in linking national policies with the needs of local communities at the gampong level. To achieve sustainable development and community welfare, improving the capacity of gampong apparatus in public policy-making is essential. They need to have a strong understanding of public policy concepts, good policy analysis skills, and the ability to formulate policies that are relevant and responsive to community needs. In addition, involving the active participation of the community in the policy process and having effective communication skills are important factors in creating policies that are more inclusive and have a positive impact on the gampong/village.

Keywords: Village Development, The Role of the Gampong Apparatus, Public Policy, Community Participation, Policy Inclusiveness.

ABSTRAK

Dalam konteks pembangunan desa yang terus berkembang, peran aparatur gampong sangat penting dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal di tingkat gampong. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam pembuatan kebijakan publik menjadi sangat esensial. Mereka perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep kebijakan publik, keterampilan analisis kebijakan yang baik, serta kemampuan merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan dan memiliki keterampilan komunikasi yang efektif adalah faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi gampong/desa tersebut.

Kata kunci: Pembangunan Desa, Peran Aparatur Gampong, Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Inklusifitas Kebijakan

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan yang terus berkembang, peran aparatur gampong dalam merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan publik di tingkat gampong atau desa menjadi semakin penting (Amaris, 2023; Rahman et al., 2023; Sofianus et al., 2023). Gampong, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki peranan vital dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan konkret masyarakat local (Luturmas et al., 2023; Sopannah et al., 2023). Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang

semakin kompleks, peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam pembuatan kebijakan publik menjadi esensial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas aparatur gampong yang kuat dalam pembuatan kebijakan publik memiliki relevansi yang mendalam (Afdaludin & Setiawati, 2023; Mardhika, 2023). Mengingat keberagaman dan perubahan yang terjadi di masyarakat, aparatur gampong perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, mereka akan mampu merancang kebijakan yang responsif, kontekstual, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas dalam bidang ini sangat penting untuk mendukung tugas aparatur gampong dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.

Melalui pemahaman konsep dasar kebijakan publik, aparatur gampong akan mampu memahami esensi dari setiap tahapan dalam siklus kebijakan. Mulai dari perumusan hingga evaluasi, mereka akan memiliki wawasan yang komprehensif untuk mengambil keputusan yang tepat. Keterampilan analisis kebijakan juga menjadi kunci dalam menentukan masalah dan peluang yang memerlukan tindakan kebijakan. Dengan memahami bagaimana menganalisis dampak kebijakan, aparatur gampong dapat mengarahkan sumber daya dengan efektif dan efisien.

Pembuatan kebijakan yang sukses memerlukan kemampuan merumuskan alternatif kebijakan yang memadai dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Program peningkatan kapasitas ini akan memberikan aparatur gampong panduan dalam mengidentifikasi solusi dan mengembangkan rencana tindak lanjut yang terukur. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting. Program ini akan memberikan aparatur gampong keterampilan untuk melibatkan warga dalam proses pembuatan kebijakan, menghasilkan keputusan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan riil.

Keterampilan komunikasi juga menjadi fokus utama dalam program ini. Memahami bagaimana menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan mudah dipahami akan memberikan kebijakan tersebut kesempatan lebih besar untuk diterima dan dijalankan. Seiring dengan itu, pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang teknik pemantauan dan evaluasi, aparatur gampong akan dapat mengukur dampak kebijakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dalam kesimpulannya, peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam pembuatan kebijakan publik gampong/desa menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pemahaman konsep, keterampilan analisis, kemampuan merumuskan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan keterampilan komunikasi yang ditingkatkan, aparatur gampong akan mampu berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Program ini, dengan tujuan mulia, diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi gampong/desa dan masyarakatnya.

Pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup menjadi tujuan utama pembangunan yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan local (Dacholfany, 2018; Hasan & Azis, 2018; Karsidi, 2002; Nindatu, 2019). Dalam konteks tersebut, peran aparatur desa memiliki peranan yang sangat krusial dalam menggarap potensi serta menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa. Desa-desa di seluruh penjuru dunia menjadi ruang yang penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi penduduknya (Junarto & Salim, 2022; Raharjo, 2021; Soleh, 2017).

Gampong Matang Puntong, yang terletak di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, adalah contoh nyata dari unit masyarakat yang memerlukan dukungan strategis dalam hal pengembangan masyarakat dan pemerintahan yang baik. Sebagai entitas yang lebih dekat dengan masyarakat, aparatur Gampong memiliki peranan yang tidak bisa diabaikan dalam mendorong perubahan positif dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil Masyarakat (Badrudin, 2012; Said, 2018; Setiyono, 2023; Zamroni et al., 2015)

Dalam upaya mewujudkan partisipasi aktif dan inklusif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan desa (Agustin, 2016; Hariyono, 2020; Nazaruddin, 2021; Sudianing & Ardana, 2022), Penting bagi aparatur Gampong di Gampong Matang Puntong untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam merumuskan, melaksanakan, dan memantau kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya dan akses informasi seringkali menjadi kendala dalam proses ini, dan oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Pada konteks ini, program pengabdian masyarakat yang diusulkan bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada aparatur desa di Gampong Matang Puntong dalam bidang pengembangan kebijakan publik. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini, diharapkan aparatur Gampong akan mampu berperan lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Gampong.

Dalam dua halaman pendahuluan ini, kami akan menguraikan latar belakang kondisi Gampong Matang Puntong, mencermati peran penting aparatur Gampong dalam proses pembangunan, dan merinci tujuan serta manfaat yang diharapkan dari program pelatihan ini. Selain itu, kami juga akan membahas pendekatan yang akan kami gunakan dalam mengimplementasikan program ini dan menguraikan harapan jangka panjang yang ingin dicapai melalui upaya pengabdian masyarakat ini.

METODE

perencanaan program peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam pembuatan kebijakan publik, kami akan memulai dengan analisis kebutuhan yang mendalam, menggali perspektif dan tantangan yang dihadapi oleh aparatur gampong serta masyarakat Gampong Matang Puntong. Berdasarkan hasil analisis ini, kami akan merancang kurikulum pelatihan yang relevan, menyesuaikannya dengan teknologi pendukung jika diperlukan, dan bekerja sama dengan instruktur berpengalaman dalam bidang kebijakan publik. Selain itu, kami akan merencanakan logistik, seperti pemilihan tempat pelatihan dan penyediaan materi pelatihan yang interaktif, serta menetapkan indikator keberhasilan yang akan membantu dalam mengukur dampak program secara efektif.

Dalam tahapan persiapan pelatihan, metode yang digunakan mencakup analisis kebutuhan, studi literatur, konsultasi dengan ahli, penyusunan materi pelatihan, pemilihan instruktur, perencanaan logistik, komunikasi awal dengan peserta, evaluasi dan pengukuran dampak, serta penganggaran. Dengan metode ini, program pelatihan dapat dipersiapkan dengan baik untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam pembuatan kebijakan publik

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dengan pendekatan kearifan lokal di Gampong Matang Puntong, Aceh Utara, telah memberikan hasil yang signifikan. Melalui kolaborasi antara Pemerintahan Gampong dan akademisi di tingkat lokal dalam hal Universitas Malikussaleh, program ini telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam merancang kebijakan publik yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Serambi Indonesia, 2023). Berikut adalah beberapa hasil yang dicapai melalui program ini:

Peningkatan Pengetahuan

Dalam beberapa waktu terakhir, terlihat adanya perkembangan yang menggembirakan di kalangan aparatur desa. Mereka telah menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan dalam berbagai bidang terkait kebijakan publik. Peningkatan pemahaman mereka terhadap dasar-dasar kebijakan publik memberi mereka landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, analisis kebijakan yang lebih mendalam juga menjadi bagian dari peningkatan ini, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan merencanakan solusi yang lebih efektif.

Selain aspek kebijakan, aparatur desa juga telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang partisipasi masyarakat dan komunikasi kebijakan. Mereka kini lebih sadar akan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yang merupakan langkah positif menuju pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif. Dengan kemampuan berkomunikasi kebijakan yang lebih baik, mereka dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan pemahaman masyarakat, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat diakses dan dimengerti dengan baik oleh semua pihak terkait.



Gambar 1. Perumusan Kebijakan Publik

Penerapan Kearifan Lokal

Dalam pelaksanaan program ini, terlihat penekanan khusus pada penerapan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan. Aparatur desa yang terlibat dalam program ini telah diberdayakan dengan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi, menghormati, dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan yang mereka buat. Hal ini bukan hanya sekedar implementasi rutin, tetapi mencerminkan suatu perubahan filosofi dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memasukkan aspek-aspek kearifan lokal ini, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi instrumen formal dari

pemerintah, tetapi juga menciptakan kebijakan yang memiliki akar budaya yang dalam, sehingga lebih autentik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat (Gemarnews, 2023).

Dampak dari penerapan kearifan lokal ini terlihat dalam penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai lokal tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat, tetapi juga membangun rasa kepercayaan dan keterlibatan aktif dari mereka. Dengan demikian, tidak hanya tercipta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya. Kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam pembangunan dan kebijakan publik bukan hanya meningkatkan kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat desa, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.



Gambar 2. Pemberdayaan Keterampilan

Partisipasi Masyarakat yang Meningkatkan

Dalam pelaksanaan program ini, terlihat penekanan khusus pada penerapan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan. Aparatur desa yang terlibat dalam program ini telah diberdayakan dengan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi, menghormati, dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan yang mereka buat. Hal ini bukan hanya sekedar implementasi rutin, tetapi mencerminkan suatu perubahan filosofi dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memasukkan aspek-aspek kearifan lokal ini, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi instrumen formal dari pemerintah, tetapi juga menciptakan kebijakan yang memiliki akar budaya yang dalam, sehingga lebih autentik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Dampak dari penerapan kearifan lokal ini terlihat dalam penerimaan kebijakan oleh masyarakat. Kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai lokal tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat, tetapi juga membangun rasa kepercayaan dan keterlibatan aktif dari mereka. Dengan demikian, tidak hanya tercipta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya. Kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam pembangunan dan kebijakan publik bukan hanya meningkatkan kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat desa, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Efisiensi Anggaran

Melalui pendekatan inovatif yang melibatkan pelatihan di dalam daerah dengan melibatkan akademisi dan sumber daya lokal, program ini telah berhasil mencapai efisiensi anggaran yang sangat signifikan untuk Pemerintah Daerah Aceh Utara. Dengan mengurangi ketergantungan pada pelatihan di luar daerah, biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk

transportasi, akomodasi, dan fasilitas pelatihan dapat diminimalkan secara substansial . Selain itu, melibatkan akademisi dan sumber daya lokal tidak hanya memberdayakan komunitas setempat secara ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan lebih relevan dengan konteks lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya menciptakan efisiensi finansial bagi Pemda Aceh Utara, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mengoptimalkan manfaat pelatihan bagi peserta dan masyarakat sekitar.

Dampak positif dari kebijakan pelatihan di dalam daerah ini tidak hanya terbatas pada efisiensi anggaran belaka. Dengan melibatkan akademisi dan sumber daya lokal, program ini juga membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih erat antara Pemda Aceh Utara dengan institusi pendidikan dan komunitas setempat. Hal ini tidak hanya mendukung pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar sektor, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang saling menguntungkan. Kolaborasi semacam ini membangun jembatan antara teori dan praktik, memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga teraplikasi dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, program ini menciptakan dampak yang berkelanjutan, membangun kapasitas lokal, dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan dan pelatihan masyarakat.

Kolaborasi Berkelanjutan

Kerjasama yang berlangsung antara Pemerintah Daerah Aceh Utara, akademisi, dan masyarakat lokal telah membentuk sebuah iklim kolaborasi yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, ide-ide inovatif dan pengalaman praktis dapat bertemu, menciptakan kesempatan untuk pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini bukan hanya menciptakan sinergi di antara berbagai pihak, tetapi juga membangun fondasi bagi pengembangan program-program serupa di masa depan. Dengan memanfaatkan keberhasilan dan pelajaran yang diperoleh dari kolaborasi saat ini, Pemda Aceh Utara dapat merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif baru yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, kerjasama ini juga meningkatkan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan, dengan memberikan akses ke pengetahuan dan sumber daya yang terus-menerus berkembang, memastikan bahwa mereka terus memperoleh keterampilan dan wawasan terbaru yang mendukung kinerja mereka dalam melayani masyarakat.



Gambar 3. Pemetaan Iklim Kolaborasi

Dengan terjalannya iklim kolaborasi yang berkelanjutan, sinergi antara Pemda Aceh Utara, akademisi, dan masyarakat lokal bukan hanya menjadi keberhasilan saat ini, tetapi juga menjadi modal berharga untuk pembangunan masa depan. Melalui pertukaran ide dan pengetahuan yang terus-menerus, komunitas ini dapat terus menciptakan inovasi dan

merancang solusi-solusi kreatif untuk tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi. Sebagai hasilnya, iklim kolaborasi yang dinamis ini tidak hanya memperkaya kebijakan dan program-program yang ada, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Kolaborasi berkelanjutan ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan di Aceh Utara, memberikan peluang bagi pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan di seluruh gampong dan wilayah pemerintahan setempat.

Peningkatan Kualitas Kebijakan

Dengan pengetahuan baru yang telah diperoleh melalui program pelatihan, para aparatur desa di Gampong Matang Puntong telah mengalami peningkatan kualitas dalam merumuskan kebijakan. Mereka kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan kebijakan, seperti analisis kebijakan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi dampak kebijakan. Kemampuan mereka untuk merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan efektif mencerminkan hasil nyata dari program pelatihan ini (Pikiran Aceh, 2023). Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dengan pemahaman yang mendalam ini memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Matang Puntong, karena selama ini di Gampong Matang Puntong masih sulit atau mengalami hambatan dalam Implementasi kebijakan yang sudah dihasilkan, diantaranya kebijakan penertiban ternak yang sampai hari ini masih terkendala di tahapan implementasi di Gampong Matang Puntong.

Dalam konteks Gampong Matang Puntong, peningkatan kualitas kebijakan memiliki dampak yang signifikan. Kebijakan-kebijakan yang lebih relevan dan efektif dapat mengatasi tantangan-tantangan lokal yang dihadapi oleh masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi, masyarakat Gampong Matang Puntong dapat mengharapkan perubahan positif dalam standar hidup mereka. Dengan demikian, peningkatan kualitas kebijakan tidak hanya merupakan pencapaian penting dalam pengembangan kapasitas aparatur desa, tetapi juga membawa manfaat nyata kepada masyarakat setempat, memperkuat ikatan antara pemerintah desa dan warganya.

Pentingnya peningkatan kualitas kebijakan ini juga menciptakan landasan yang kokoh untuk masa depan Gampong Matang Puntong. Dengan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, desa ini dapat mengembangkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat lokal, memperkuat kerjasama dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak positif bagi semua warganya. Dengan demikian, peningkatan kualitas kebijakan bukan hanya menciptakan perubahan positif saat ini, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk perkembangan berkelanjutan dan kemakmuran jangka panjang di Gampong Matang Puntong.

KESIMPULAN

Program pelatihan dan kolaborasi yang melibatkan aparatur desa, akademisi, dan masyarakat lokal, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman aparatur desa terkait kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Para aparatur desa telah berhasil mengintegrasikan pengetahuan baru ini dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan relevan, dengan memperhatikan aspek kebijakan publik, partisipasi masyarakat, analisis kebijakan, dan kearifan lokal. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak

hanya lebih autentik dan sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Peningkatan kualitas kebijakan ini juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warganya, menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Selain itu, melibatkan akademisi dan sumber daya lokal dalam program pelatihan tidak hanya menciptakan efisiensi anggaran, tetapi juga membangun kerjasama yang berkelanjutan, memperkaya kebijakan dan program-program yang ada, serta membuka peluang untuk inovasi dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Secara keseluruhan, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat lokal telah menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kapasitas, pembangunan berkelanjutan, dan kemakmuran jangka panjang di Gampong Matang Puntong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh atas dukungan keuangan yang luar biasa dalam mendanai kegiatan pengabdian masyarakat kami. Dengan bantuan ini, kami berhasil melaksanakan proyek kami dengan sukses, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kami. Dukungan LPPM telah membuka pintu peluang untuk kami memberikan dampak positif pada masyarakat, dan kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdaludin, A., & Setiawati, B. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Dengan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pakancangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu SUNGAI UTARA. *JAPB*, 6(1), 70–80.
- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Amaris, M. S. (2023). *Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Gampong Pineung Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika otonomi daerah*. UPP STIM YKPN.
- Dacholfany, M. I. (2018). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan non-formal. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(1), 43–74.
- Gemarnews. (2023). *Universitas Malikussaleh Latih Aparatur Gampong Dalam Menyusun Kebijakan Publik*. Gemarnews. <https://www.gemarnews.com/2023/10/universitas-malikussaleh-latih-aparatur.html>
- Hariyono, T. (2020). Partisipasi perempuan desa karangsari dalam mewujudkan pembangunan inklusif. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(2), 281–298.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Junarto, R., & Salim, M. N. (2022). Strategi membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa: Bukti dari gunung Sewu Geopark, Indonesia. *Tunas Agraria*, 5(2), 142–164.
- Karsidi, R. (2002). Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil. *Makalah*

- Disampaikan Pada Disampaikan Dalam Semiloka Pemberdayaan Masyarakat Di Jawa Tengah Dalam Rangka Pelaksanaan Otoda. Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, Di Semarang, 1–11.*
- Luturmas, Y., Yunus, N. R., Mujib, F., Amane, A. P. O., & Mustanir, A. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa*. Global Eksekutif Teknologi.
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 87–94.
- Nazaruddin. (2021). The Implementation Electronic Application E-Musrenbang Towards Local Development Planning in Lhokseumawe, Indonesia. *Atlantis Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.210125.054>
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 3(2), 91–103.
- Pikiran Aceh. (2023). *Universitas Malikussaleh Latih Aparatur Gampong Dalam Menyusun Kebijakan Publik*. Pikiran Aceh. <https://aceh.pikiran-rakyat.com/news/pr-2987287141/universitas-malikussaleh-latih-aparatur-gampong-dalam-menyusun-kebijakan-publik?page=all>
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Rahman, B., Akmal, M., Muzaffarsyah, T., Zuhilmi, Z., Hidayat, B., & Irfan, I. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Keude Jirat Manyang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*, 4(1), 356–366.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam perspektif governance*. Deepublish.
- Serambi Indonesia. (2023). *Tim Dosen Unimal Latih Aparatur Gampong di Aceh Utara Susun Kebijakan Publik*. SerambiNews. <https://aceh.tribunnews.com/2023/10/25/tim-dosen-unimal-latih-aparatur-gampong-di-aceh-utara-susun-kebijakan-publik>
- Setiyono, B. (2023). *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Sofianus, T., Aruni, F., Angreni, D. K. D., & Kamaly, N. (2023). Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota Lhokseumawe. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 44–63.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Sopanah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Masa Pandemi Covid19 Di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2), 100–115.
- Zamroni, S., Anwar, M. Z., Yulianto, S., Rozaki, A., & Edi, A. C. (2015). *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*. Institute for Research and Empowerment.